

**KONSEP ASAS LEGALITAS TERHADAP PENERAPAN *LIVING LAW*
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Oleh

Nazhif Ali Murtadho

NIM. 05040720042



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazhif Ali Murtadho
NIM : 05040720042
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Konsep Asas Legalitas Terhadap Penerapan *Living Law* Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 November 2023

Saya yang menyatakan,



Nazhif Ali Murtadho

NIM. 05040720042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

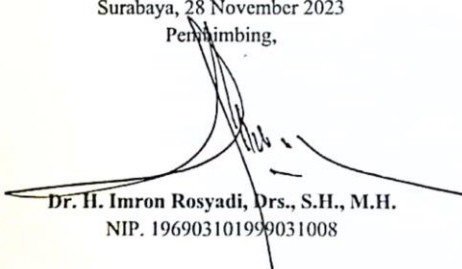
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nazhif Ali Murtadho
NIM. : 05040720042
Judul : Konsep Asas Legalitas Terhadap Penerapan *Living Law*
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 November 2023
Pembimbing,



Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Nazhif Ali Murtadho

NIM. : 05040720042

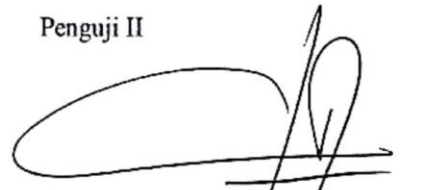
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi:

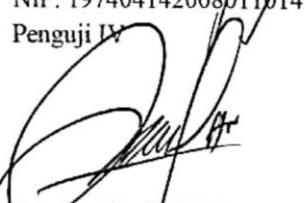
Penguji I


Dr. H. Imron Rosvadi, S.H., M.H
NIP. 196903101999031008
Penguji III

Penguji II


Dr. H. Nafi Mubarak, M.H., M.H.I
NIP. 197404142008011014
Penguji IV


Marli Candra, LLb (Hons.), MCL
NIP. 198506242019031005


Daman Huri, SH, M.Hum
NIP. 202111014

Surabaya, 20 Desember 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. M. Mufafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nazhif Ali Murtadho
NIM : 05040720042
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : 05040720042@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KONSEP ASAS LEGALITAS TERHADAP PENERAPAN LIVING LAW DALAM

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM PIDANA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 April 2024

Penulis

(Nazhif Ali Murtadho)

ABSTRAK

Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali adalah prinsip utama dalam hukum pidana. Asas legalitas (*the principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa setiap tindakan kriminal (tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu dengan peraturan hukum yang berlaku, atau setidaknya dengan Undang-Undang yang ada, sebelum seseorang melakukan perbuatan tersebut. Asas ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Namun dalam perkembangannya asas legalitas tidak berlaku secara absolut karena adanya pengakuan terhadap konteks *Living Law* atau hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam Pasal 2 ayat (1). Karena kedepannya aturan dari asas legalitas ini hukum adat tertulis di seluruh daerah yang ada di pelosok negara Indonesia. Namun apakah semua peraturan *living law* itu mengatur semua tindak pidana atautah tidak dan apakah semua kasus tindak pidana atau perbuatan pidana diselesaikan dengan *living law*. Penelitian ini menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah: bagaimana analisis asas legalitas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana analisis batasan penerapan asas legalitas terhadap *living law* dalam hukum pidana nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal. Teknik yang digunakan adalah dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dengan metode *statute approach* dan *conceptual approach* yang selanjutnya disusun secara sistematis hingga menjadi bahan hukum dalam memberikan gambaran tentang konsep asas legalitas terhadap penerapan *living law* dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya hasil sumber hukum tersebut diolah dan dianalisis menggunakan asas legalitas, doktrin *living law* dan teori kontemporer terkait *restorative justice*.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini: *Pertama*, asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP baru memuat dua prinsip, prinsip *nullum crimen, noela poena sine lege praevia* dan prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege stricta*. Pembatasan terhadap prinsip legalitas dalam Pasal 2 secara implisit menerima doktrin melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif. *Kedua*, penerapan batasan asas legalitas terhadap kasus *living law* yakni pencurian *pratima* tersebut berpedoman pada doktrin sifat melawan hukum formil dan materiil. Kasus *pratima* dalam konteks *living law* tersebut dapat diterapkan asalkan berpedoman pada doktrin hukum pidana modern, yakni teori kontemporer dan gabungan dalam tujuan pidana. Teori kontemporer berpijak pada, *pertama*, teori efek jera (*deterrence effect*), *kedua*, teori edukasi, *ketiga*, teori keadilan restoratif, *keempat*, teori *rehabilitation*.

Selaras dengan rangkuman di atas, penulis merekomendasikan: *Pertama*, pemerintah daerah segera memilah dan menentukan tindak pidana adat apa saja yang relevan dimasukkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana pengejawantahan asas legalitas. *Kedua*, tindak pidana adat atau delik adat dapat diterapkan asalkan berpedoman pada paradigma hukum pidana modern, yakni keadilan korektif, keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif, yang selanjutnya mengacu pada teori kontemporer dalam tujuan pidana sebagaimana penulis paparkan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II ASAS LEGALITAS DAN PENERAPAN <i>LIVING LAW</i> DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023	23
A. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana	23
1. Sejarah dan Landasan Filsafati Asas Legalitas	23
2. Definisi dan Makna yang Terkandung Dalam Asas Legalitas	36
3. Sumber dan Dasar Hukum Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.....	45
4. Tujuan dan Fungsi Asas Legalitas.....	51
B. Konsep <i>Living Law</i> Dalam Hukum Pidana	56
1. Sejarah <i>Living Law</i>	56
2. Pengertian <i>Living Law</i>	62
3. Landasan <i>Living Law</i> Terhadap Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia	67
BAB III ASAS LEGALITAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023	74
A. Asas Legalitas Sebagai Norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional	74

B. Analisis Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional	85
BAB IV PENERAPAN ASAS LEGALITAS TERHADAP <i>LIVING LAW</i> DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL	104
A. Asas Legalitas Terhadap <i>Living Law</i> Dalam Hukum Pidana Nasional.....	104
B. Analisis Batasan Penerapan Asas Legalitas Terhadap <i>Living Law</i> Dalam Hukum Pidana Nasional	119
1. Tindak Pidana Adat Dalam Peraturan Daerah Dan Belum Ada Dalam Peraturan Daerah.....	123
2. Ketentuan Syarat Secara Yuridis Tindak Pidana Adat atau Delik Adat yang Sudah Ada Dalam Perda dan Belum Ada Dalam Perda	127
3. Penerapan Asas Legalitas Materiil di Tana Toa Kajang dan Pelaku Pencurian <i>Pratima</i> di Bali.....	131
BAB V PENUTUP.....	145
A. Kesimpulan	145
B. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN.....	173

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Table 1 Perbedaan Asas Legalitas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru.	108
Table 2 Kondisi Masyarakat Hukum Adat	110



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. 3rd ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2006. http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Hukum_Acara_PUU-Full.pdf.
- Bakir, Herman. *Filsafat Hukum : Desain Dan Arsitektur Kesejarahan*. 2nd ed. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Constanzo, Mark. *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Eddy O.S. Hiariej. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. 1th ed. Jakarta: Erlangga, 2009.
- . *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- . *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Hiariej, Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Pertama. Jakarta: Red & White Publishing, 2021.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. England: Taylor & Francis, 2017. <https://books.google.co.id/books?id=sCsxDwAAQBAJ>.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar [Edisi Revisi]*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edited by PT Asdi Mahasatya. 8th ed.

Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2008.

MPR-RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Sekretariat Jenderal MPR RI. Cetakan Ke. Vol. 23. J 1. Jend. Gatot Subroto
No.6 Jakarta - 10270: MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA, 2020.

Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. 1th ed. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Pertama. Mataram: Mataram University
Press, n.d.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana, 2010.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by Redaksi
Refika. 3rd ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Rizal, Moch Choirul, and Muhammad Fikri Alan. *Mempertahankan Asas Legalitas
Dan Beberapa Konsekuensinya*. 1th ed. Kediri: Lembaga Studi Hukum
Pidana, 2023.

<https://puskumham.iainkediri.ac.id/2023/06/30/mempertahankan-asas-legalitas-dan-beberapa-konsekuensinya/>.

Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. 1th ed. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.

Saleh, Roeslan. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara
Baru, 1983.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Edited by Politeia. Pertama. Bogor: PT Politeia, 1995.

Triasari, Devi. *KUHP & KUHP Superkomplet*. Edited by Tim Charissa. 1th ed.

Yogyakarta: Charissa Publisher, 2019.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 1th ed. Tangerang

Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

<https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar Hukum Pidana di>

Indonesia by Dr. Fitri Wahyuni., S.H., M.H. %28z-

lib.org%29.pdf.Abdulgani, Rika Kurniasari. “Rekonstruksi Asas Legalitas

Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kaitannya Dengan Prinsip Kearifan Lokal.” *Institutional Repositories &*

scientific journals 3, no. 1 (2019): 1–29.

<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/45273%0A>.

Abdulloh, Uti. “Relevansi Penerapan Asas Legalitas Dalam Penjatuhan Sanksi

Pada Masyarakat Hukum Adat.” *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*

2, no. 1 (2022): 7–18.

<http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/alqadlaya/article/view/928/410>.

Adnyana, Putu Eva Ditayani Antari dan I Kadek Budiadinata Satriatama.

“Kewenangan Dan Kekuatan Hukum Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Kerta

Desa Adat Di Bali.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023):

187–210. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/6782>.

Agung-RI, Mahkamah. *The Rome Statute of the International Criminal Court (17*

Juli 1998) Dengan Terjemahannya Undang-Undang Roma Pengadilan

Pidana Internasional. Jakarta: Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung-RI,

1998.

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/06.pdf>.

Ali Dahwir Barhamudin. “Penyimpangan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2014): 120–137.

<https://media.neliti.com/media/publications/9156-ID-penyimpangan-asas-legalitas-dalam-undangundang-nomor-26-tahun-2000-tentang-penga.pdf>.

Amin, Idi. “Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Jatiswara* 33, no. 1 (2018): 1–11.

<http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/152>.

Arrasuli, Beni Kharisma. “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Rancangan KUHP : Problematika Asas Legalitas Dan Over-Kriminalisasi.” *Jurnal: UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 722–736. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/879/626>.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. 3rd ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2006. http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Hukum_Acara_PUU-Full.pdf.

Bakir, Herman. *Filsafat Hukum : Desain Dan Arsitektur Kesejarahan*. 2nd ed. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Basrawi. “Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal: Al-’Adl* 13, no. 1 (2020): 70–81. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/download/1723/pdf>.

Butarbutar, E. Nurhaini. “Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum.” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2012): 145–157.

<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10614/9494>.

Christianto, Hwian. "Pembaharuan Makna Asas Legalitas." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 39, no. 3 (2009).

https://www.academia.edu/44396991/PEMBAHARUAN_MAKNA_ASAS_LEGALITAS.

Collection, United Nations Treaty. "United Nations: International Covenant on Civil and Political Rights." *American Journal of International Law* 61, no. 3 (1967): 870–887. https://treaties.un.org/doc/treaties/1976/03/19760323_06-17am/ch_iv_04.pdf.

Constanzo, Mark. *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.

Dkk, Johari. "Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65–77. <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11/6>.

Eddy O.S. Hiariej. *Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. 1th ed. Jakarta: Erlangga, 2009.

———. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

———. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Fuad, Fakhrul, Hambali Thalib, and & Zainuddin. "Penerapan Asas Legalitas Materil Terhadap Hukum Pidana Adat: Studi Tana Toa Kajang." *Journal of Lex Theory (JLT)* 2, no. 1 (2021): 1–18. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/396>.

- Genta, Yehezkiel. “Reinterpretasi Makna Asas Legalitas Sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat Dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat.” *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 53.
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/445>.
- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 1–10.
<https://talenta.usu.ac.id/Mahadi/article/view/8311/4632>.
- Hairi, Prianter Jaya. “Kontradiksi Pengaturan ‘Hukum Yang Hidup Di Masyarakat’ Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia.” *NEGARA HUKUM* 7, no. 1 (n.d.): 89–110.
<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/924>.
- Hiariej, Edward Omar Sharif. “Asas Legalitas Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.” Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Hiariej, Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Pertama. Jakarta: Red & White Publishing, 2021.
- Hikmah, Andri Yanto dan Faidatul. “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas.” *Recht Studiosum Law Review* 02, no. 02 (2023): 81–91.
<https://talenta.usu.ac.id/rslr>.
- Iksan, Muchamad. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah).”

Jurnal Serambi Hukum 11, no. 01 (2017): 1–26.

<https://www.neliti.com/publications/163598/asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-studi-komparatif-asas-legalitas-hukum-pidana-i#cite>.

Indonesia. *Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015*

Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Indonesia, 2015.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/115179/perda-kab-bulukumba-no-09-tahun-2015>.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. *JDIH BPK-RI*. Indonesia, 2009.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Indonesia, 2023.

Investasi, JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan. “UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Jdih.Maritim.Go.Id*. Last modified 2023. Accessed October 15, 2023. <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>.

Kayuan, Ni Putu Ari Setyaningsih dan Putu Chandra Kinandina. “Kompilasi Delik Adat Dalam Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP).” *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): 71–79.

<https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/902/781>.

Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. England: Taylor & Francis,

2017. <https://books.google.co.id/books?id=sCsxDwAAQBAJ>.

Khasan, Moh. “Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law).” *Rechtsvinding* 6, no. 1 (2017): 21–36.

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/133/133>.

Luthan, Salman. “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 1–17.

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3839>.

Maheswara, Ida Bagus Alit Yoga. “Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 1011–1023.

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/39324>.

Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana, 2005.

Masril, Masril, and Ade Kosasih. “Keberlakuan Asas Ne Bis in Idem Terhadap Putusan Pengadilan Adat Dalam Tata Hukum Indonesia.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 49.

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2167>.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar [Edisi Revisi]*.

Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edited by PT Asdi Mahasatya. 8th ed.

Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2008.

MPR-RI. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Sekretariat Jenderal MPR RI. Cetakan Ke. Vol. 23. J 1. Jend. Gatot Subroto

No.6 Jakarta - 10270: MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA, 2020.

Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. 1th ed. Sidoarjo: Kanzun Books,
2020.

———. “Living Law Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Positif Di Indonesia.”

ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman 11, no. 1 (2016): 135–158.

<http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1143/>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Pertama. Mataram: Mataram University
Press, n.d.

Mulyadi, Lilik. “Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas,
Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2,
no. 2 (2013): 225.

[https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/
view/115](https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/115).

Nations, United. *Universal Declaration of Human Right*. United Nations, 1948.

https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf.

Nurdin, Fransiskus Saverius. “Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana
Berdasarkan Prinsip Keadilan.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1
(2016): 1. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/634>.

Nursalam. “Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan
Hukum Islam.” UIN Alauddin Makassar, 2016. [http://repositori.uin-
alauddin.ac.id/5192/](http://repositori.uin-
alauddin.ac.id/5192/).

Pawana, Sekhar Chandra. “Polemik Atas Konsep" Hukum Yang Hidup" Dalam

Pembaharuan KUHP Di Indonesia.” *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1, no. 1 (2023): 51–62. <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/judicatum/article/view/4045%0Ahttp://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/judicatum/article/download/4045/1974>.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Ed. 1, Cet. Jakarta: Kencana, 2010.

Pradiva, I Gusti Ngurah Bayu, and Diah Ratna Sari Hariyanto. “Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): 1766. <https://www.semanticscholar.org/paper/PERLUASAN-ASAS-LEGALITAS-DALAM-RKUHP-SEBAGAI-UPAYA-Pradiva-Hariyanto/b72ca06969f3e377207c675937c24a8cdbc3a66e?p2df>.

Pristiwati, Endang. “Konsekuensi Yang Timbul Dari Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Materiil.” *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014): 1–6. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/171/112>.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Edited by Redaksi Refika. 3rd ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.

Putra Jaya, Nyoman Serikat. “Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 123–130. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13681>.

Putri, Nella Sumika. “Memikirkan Kembali Unsur ‘Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat’ Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas.” *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 60–72.

<https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5>.

Rights, European Court of Human. *European Convention on Human Rights. The Cambridge Law Journal*. Vol. 24, 1950.

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ENG.

Rizal, Moch Choirul, and Muhammad Fikri Alan. *Mempertahankan Asas Legalitas Dan Beberapa Konsekuensinya*. 1th ed. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2023.

<https://puskumham.iainkediri.ac.id/2023/06/30/mempertahankan-asas-legalitas-dan-beberapa-konsekuensinya/>.

Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*. 1th ed. Surabaya: Revka Prima Media, 2022.

Saleh, Roeslan. *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Situngkir, Danel Aditia. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional." *Soumater Law Review* 1, no. 1 (2018): 22. <https://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3398>.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Edited by Politeia. Pertama. Bogor: PT Politeia, 1995.

Sri Rahayu. "Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Inovatif* VII, no. September (2014): 4. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2170>.

Sudibyo, Ateng, and Aji Halim Rahman. "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam

Hukum Pidana.” *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 55–79.

<https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/985>.

Suhariyanto, Budi. “Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (2018): 421.

<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/33227/22788>.

Suhartoyo. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cet. Ke-1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Sukirno. “Revitalisasi Dan Aktualisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Pidana Positif.” *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 1 (2018): 141–153.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2825>.

Sulhan. “Koeksistensi Asas Legalitas Dan Asas Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Kuhp Baru.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73312>.

Tahir, Ach. “Menggali Makna Asas Legalitas Dan Perkembangannya Di Indonesia.” *Al-Maza>hib* 1, no. 2 (2012): 27. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1358>.

Tamara, Andreas Calvin. “Eksistensi Penemuan Hukum Dan Asas Leggalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/PN.BGL).” *Lex Crimen* 10, no. 3 (2021): 71–81.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/33121>.

Tresya. "Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 1–10.

[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1796663&val=18124&title=Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1796663&val=18124&title=Sifat%20Melawan%20Hukum%20Materiil%20Dalam%20Perbuatan%20Pidana%20Penanganan%20Bencana%20Non-Alam%20Covid%2019).

Triasari, Devi. *KUHP & KUHP Superkomplet*. Edited by Tim Charissa. 1th ed. Yogyakarta: Charissa Publisher, 2019.

Utari, Ida Bagus Gede Angga Juniarta dan Anak Agung Sri. "Pencurian Pratima Di Bali Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2014): 1–5.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/9121/6880>.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 1th ed. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia by Dr. Fitri Wahyuni., S.H., M.H. %28z-lib.org%29.pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni%2C%20S.H.%2C%20M.H.%20-%20lib.org%29.pdf).

Widayati, Lidya Suryani. "Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP." *Negara Hukum* 2, no. 2 (2011): 307–328.

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/219>.

Widyatmoko, Aditya. "Komparasi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." Universitas Sebelas Maret, 2010.

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/12355/MjY5MTc=/Komparasi->

asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-islam-dan-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp-abstrak.pdf.

- Wijaya, Pande Made Kresna. “Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku Pencurian Pratima Di Bali.” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2019): 296–307. <https://www.neliti.com/publications/363550/pemberian-sanksi-adat-kepada-pelaku-pencurian-pratima-di-bali>.
- Wijayanto, Enggar. “Otonomi, Perda Syariah Dan Living Law Di Negara Hukum Pancasila (Autonomy, Sharia Regional Regulations And Living Law In The Pancasila Law State).” *Jurnal Hukum Dan Ham Wicarana* 1, no. 2 (2022): 150–160. <https://ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/24/16>.
- Wirasila, Luh Mia Ayu Pratiwi dan Anak Agung Ngurah. “Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Benda Sakral Dibali (Studi Kasus Di Tingkat Penyidik).” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 2 (2022): 247–259. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/70034/42727>.
- Yasanegara, I Gde. “Urgensi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Di Indonesia.” *Kerta Dyatmika* 13, no. 1 (2016): 1–17. <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/384>.
- Yuherawan, Deni Setyo Bagus. *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana “Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana.”* 1th ed. Malang: Setara Press, 2014.

JURNAL

- Abdulgani, Rika Kurniasari. “Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kaitannya Dengan Prinsip Kearifan Lokal.” *Institusional Repositories & scientific journals* 3, no. 1 (2019): 1–29. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/45273%0A>.
- Abdulloh, Uti. “Relevansi Penerapan Asas Legalitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pada Masyarakat Hukum Adat.” *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 7–18. <http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/alqadlaya/article/view/928/410>.
- Adnyana, Putu Eva Ditayani Antari dan I Kadek Budiadinata Satriatama. “Kewenangan Dan Kekuatan Hukum Putusan Yang Dikeluarkan Oleh Kerta Desa Adat Di Bali.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2023): 187–210. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/6782>.
- Ali Dahwir Barhamudin. “Penyimpangan Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2014): 120–137. <https://media.neliti.com/media/publications/9156-ID-penyimpangan-asas-legalitas-dalam-undangundang-nomor-26-tahun-2000-tentang-penga.pdf>.
- Amin, Idi. “Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Jatiswara* 33, no. 1 (2018): 1–11. <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/152>.
- Arrasuli, Beni Kharisma. “Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Rancangan KUHP : Problematika Asas Legalitas Dan Over-Kriminalisasi.” *Jurnal: UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 722–736. <https://www.review->

unes.com/index.php/law/article/view/879/626.

Basrawi. “Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Melalui Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional.” *Jurnal: Al- 'Adl* 13, no. 1 (2020): 70–81. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/download/1723/pdf>.

Butarbutar, E. Nurhaini. “Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum.” *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2012): 145–157. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10614/9494>.

Christianto, Hwian. “Pembaharuan Makna Asas Legalitas.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 39, no. 3 (2009). https://www.academia.edu/44396991/PEMBAHARUAN_MAKNA_ASAS_LEGALITAS.

Dkk, Johari. “Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.” *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 65–77. <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11/6>.

Fuad, Fakhrol, Hambali Thalib, and & Zainuddin. “Penerapan Asas Legalitas Materil Terhadap Hukum Pidana Adat: Studi Tana Toa Kajang.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 2, no. 1 (2021): 1–18. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/396>.

Genta, Yehezkiel. “Reinterpretasi Makna Asas Legalitas Sebagai Bentuk Pengakuan Hukum Pidana Adat Dalam Upaya Menjamin Hak Asasi Masyarakat Adat.” *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 53. <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/445>.

- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 1–10.
<https://talenta.usu.ac.id/Mahadi/article/view/8311/4632>.
- Hairi, Prianter Jaya. "Kontradiksi Pengaturan 'Hukum Yang Hidup Di Masyarakat' Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia." *NEGARA HUKUM* 7, no. 1 (n.d.): 89–110.
<https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/924>.
- Hikmah, Andri Yanto dan Faidatul. "Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas." *Recht Studiosum Law Review* 02, no. 02 (2023): 81–91.
<https://talenta.usu.ac.id/rslr>.
- Iksan, Muchamad. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)." *Jurnal Serambi Hukum* 11, no. 01 (2017): 1–26.
<https://www.neliti.com/publications/163598/asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-studi-komparatif-asas-legalitas-hukum-pidana-i#cite>.
- Kayuan, Ni Putu Ari Setyaningsih dan Putu Chandra Kinandina. "Kompilasi Delik Adat Dalam Peraturan Daerah Sebagai Dasar Pemidanaan Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)." *Jurnal Yustitia* 16, no. 1 (2022): 71–79.
<https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/902/781>.
- Khasan, Moh. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum

- Pidana Islam (Justice Principles in The Principle of Legality of Islamic Criminal Law).” *Rechtsvinding* 6, no. 1 (2017): 21–36.
<https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/133/133>.
- Luthan, Salman. “Asas Dan Kriteria Kriminalisasi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 1 (2009): 1–17. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3839>.
- Maheswara, Ida Bagus Alit Yoga. “Aspek Legalitas Hukum Pidana Dengan Hukum Adat.” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 2 (2021): 1011–1023.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/39324>.
- Masril, Masril, and Ade Kosasih. “Keberlakuan Asas Ne Bis in Idem Terhadap Putusan Pengadilan Adat Dalam Tata Hukum Indonesia.” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 49.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/2167>.
- Mubarok, Nafi’. “Living Law Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Positif Di Indonesia.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2016): 135–158.
<http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1143/>.
- Mulyadi, Lilik. “Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia : Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 225.
<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/115>.
- Nurdin, Fransiskus Saverius. “Rekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Prinsip Keadilan.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 1. <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/634>.

Pawana, Sekhar Chandra. "Polemik Atas Konsep" Hukum Yang Hidup" Dalam Pembaharuan KUHP Di Indonesia." *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum* 1, no. 1 (2023): 51–62. <http://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/judicatum/article/view/4045%0Ahttp://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/judicatum/article/download/4045/1974>.

Pradiva, I Gusti Ngurah Bayu, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Perluasan Asas Legalitas Dalam Rkuhp Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 8 (2022): 1766. <https://www.semanticscholar.org/paper/PERLUASAN-ASAS-LEGALITAS-DALAM-RKUHP-SEBAGAI-UPAYA-Pradiva-Hariyanto/b72ca06969f3e377207c675937c24a8cdbc3a66e?p2df>.

Pristiwati, Endang. "Konsekuensi Yang Timbul Dari Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Materiil." *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 13, no. 2 (2014): 1–6. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/171/112>.

Putra Jaya, Nyoman Serikat. "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 123–130. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13681>.

Putri, Nella Sumika. "Memikirkan Kembali Unsur 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat' Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas." *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 60–72. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclrAvailableat:https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/5>.

Rights, European Court of Human. *European Convention on Human Rights. The*

Cambridge Law Journal. Vol. 24, 1950.

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ENG.

Situngkir, Danel Aditia. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional.” *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 22. <https://ejournal.ildikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3398>.

Sri Rahayu. “Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum Dan Keadilan.” *Jurnal Inovatif* VII, no. September (2014): 4. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2170>.

Sudibyoy, Ateng, and Aji Halim Rahman. “Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.” *Journal Presumption of Law* 3, no. 1 (2021): 55–79. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/985>.

Suhariyanto, Budi. “Problema Penyerapan Adat Oleh Pengadilan Dan Pengaruhnya Bagi Pembaruan Hukum Pidana Nasional.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (2018): 421. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/33227/22788>.

Suhartoyo. *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Cet. Ke-1. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Sukirno. “Revitalisasi Dan Aktualisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Pidana Positif.” *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 1 (2018): 141–153. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2825>.

Tahir, Ach. “Menggali Makna Asas Legalitas Dan Perkembangannya Di Indonesia.” *Al-Maza>hib* 1, no. 2 (2012): 27. <https://ejournal.uin->

suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1358.

Tamara, Andreas Calvin. “Eksistensi Penemuan Hukum Dan Asas Leggalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/PN.BGL).” *Lex Crimen* 10, no. 3 (2021): 71–81.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/33121>.

Tresya. “Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19.” *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 1–10.
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1796663&val=18124&title=Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perbuatan Pidana Penanganan Bencana Non-Alam Covid 19](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1796663&val=18124&title=Sifat%20Melawan%20Hukum%20Materiil%20Dalam%20Perbuatan%20Pidana%20Penanganan%20Bencana%20Non-Alam%20Covid%2019).

Utari, Ida Bagus Gede Angga Juniarta dan Anak Agung Sri. “Pencurian Pratima Di Bali Dalam Perspektif Hukum Pidana Adat.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2014): 1–5.

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/9121/6880>.

Widayati, Lidya Suryani. “Perluasan Asas Legalitas Dalam RUU KUHP.” *Negara Hukum* 2, no. 2 (2011): 307–328.

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/219>.

Wijaya, Pande Made Kresna. “Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku Pencurian Pratima Di Bali.” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2019): 296–307. <https://www.neliti.com/publications/363550/pemberian-sanksi-adat-kepada-pelaku-pencurian-pratima-di-bali>.

Wijayanto, Enggar. “Otonomi, Perda Syariah Dan Living Law Di Negara Hukum

Pancasila (Autonomy, Sharia Regional Regulations And Living Law In The Pancasila Law State).” *Jurnal Hukum Dan Ham Wicarana* 1, no. 2 (2022): 150–160. <https://ejournal-kumhamdiy.com/wicarana/article/view/24/16>.

Wirasila, Luh Mia Ayu Pratiwi dan Anak Agung Ngurah. “Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Benda Sakral Dibali (Studi Kasus Di Tingkat Penyidik).” *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 2 (2022): 247–259. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/70034/42727>

Yasanegara, I Gde. “Urgensi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Di Indonesia.” *Kerta Dyatmika* 13, no. 1 (2016): 1–17. <http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika/article/view/384>.

UNDANG-UNDANG

Agung-RI, Mahkamah. *The Rome Statute of the International Criminal Court (17 Juli 1998) Dengan Terjemahannya Undang-Undang Roma Pengadilan Pidana Internasional*. Jakarta: Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung-RI, 1998. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/06.pdf>.

Collection, United Nations Treaty. “United Nations: International Covenant on Civil and Political Rights.” *American Journal of International Law* 61, no. 3 (1967): 870–887. https://treaties.un.org/doc/treaties/1976/03/19760323_06-17am/ch_iv_04.pdf.

Indonesia. *Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang*. Indonesia, 2015. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/115179/perda-kab-bulukumba-no-09->

tahun-2015.

———. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. JDIH BPK-RI.* Indonesia, 2009.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

Indonesia, Republik. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.* Indonesia, 2023.

Investasi, JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan. “UU 1/2023: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Jdih.Maritim.Go.Id.* Last modified 2023. Accessed October 15, 2023. <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>.

Nations, United. *Universal Declaration of Human Right.* United Nations, 1948.
https://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf.

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Hiariej, Edward Omar Sharif. “Asas Legalitas Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat.” Universitas Gadjah Mada, 2009.

Nursalam. “Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Dan Hukum Islam.” UIN Alauddin Makassar, 2016. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/5192/>.

Sulhan. “Koeksistensi Asas Legalitas Dan Asas Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Dalam Kuhp Baru.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73312>.

Widyatmoko, Aditya. “Komparasi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Universitas Sebelas Maret,

2010.

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/12355/MjY5MTc=/Komparasi-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-islam-dan-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp-abstrak.pdf>.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A